

ATTENTION



**NURUL AINI**  
SIMPARI (SISTEM MANAJEMEN PAJAK WONOSARI)

Efektifitas Institusi Publik untuk Mencapai TPB  
Kecamatan Wonosari



# SINOBO

## Sistem Informasi Inovasi Bondowoso 2023

ATTENTION

ATTENTION

# PROPOSAL INOVASI

## SIMPARI (SISTEM MANAJEMEN PAJAK WONOSARI)

---

### RINGKASAN

Kecamatan Wonosari telah merancang suatu ide atau gagasan untuk membuat suatu Inovasi yaitu dengan membuat Aplikasi untuk optimalisasi dan memantau Penangihan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat Desa Se-Wilayah Kecamatan Wonosari yang diberi nama "SIMPARI" (Sistem Manajemen Pemantauan Penangihan Pajak PBB-P2 dan PBHTB Kecamatan Wonosari).

Inovasi SIMPARI ini dirintis sejak Tahun 2022, entri data objek pajak dan nama-nama penangih pajak serta jumlah besaran baku dan sosialisasi dilaksanakan sejak Januari s/d April Tahun 2022 dan di bulan Juni camat beserta seluruh jajarannya (Sekcam dan Kasi Pemerintahan serta Staf Pelaksana pengelola PBB-P2 dan PBHTB) sudah bisa melakukan pemantauan penangihan PBB melalui Hp dengan membuka browser melalui geogle atau chrome Login Kecamatan ketik kecwonosari.net seluruh data objek Pajak dan nama-nama penangih serta jumlah baku dan prosentase penagihan, namun lounching penggunaan Aplikasi "SIMPARI" dilakukan pada tanggal 2 Januari 2023 dengan harapan Kecamatan Wonosari di tahun 2023 ini bisa lunas 100%.

Di tahun 2021 Kecamatan Wonosari prosentase capaian Pajak PBB-P2 dan PBHTB hanya mampu melakukan penagihan 48% namun di Tahun 2022 Kemarin ada sedikit peningkatan, setelah menggunakan aplikasi SIMPARI naik menjadi 72%

### IDE INOVATIF

#### 1.1 Latar Belakang

Penagihan Pajak PBB-P2 dan PBHTB merupakan salah satu tugas Kecamatan yang bisa dikatakan paling

berat dan penuh tantangan baik dari sisi penagih (Perangkat Desa) maupun dari sisi wajib pajak sendiri karena tidak adanya aturan hukum yang mengikat atau sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang tidak mau membayar pajak, sedangkan Kecamatan sendiri setiap Tahun ditarget harus lunas 100% atau tepatnya jatuh tempo pembayaran pajak Per-tanggal 31 Agustus, sedangkan Pemerintahan Desa zaman dahulu dengan zaman sekarang jauh beda, di zaman sekarang ini penuh dengan nuasa politik dalam tanda “ yang terkadang mengintimidasi “yang membuat camat dengan jajarannya terkadang tidak berdaya” untuk itu perlu adanya strategi dan pemikiran khusus untuk menghadapi tantangan tersebut.

## 1.2 Tujuan

1. Melaksanakan Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2012
2. Transparansi Pelayanan Publik (semua masyarakat atau Pemerintah Kabupaten bisa melihat prosentase perolehan penangihan PBB di wilayah kecamatan Wonosari)
3. Efisiensi dan Efentifitas (Waktu, tenaga dan jumlah SDM di Kecamatan ) dalam rangka pelaksanaan tugas monev dan Binwas
4. Mengimplementasi core Values ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif)
5. Meminimalisir penyalahgunaan / penyelewengan keuangan pajak

## 1.3 Relevansi

Selama ini yang kita rasakan Kecamatan merupakan pelaksana Objek kegiatan tusi semua OPD di wilayah Kabupaten Bondowoso sehingga terkadang kita sudah fix membuat jadwal kegiatan monev dan pembinaan PBB di semua Desa namun karena adanya jadwal yang berbenturan sedangkan personil ASN di kecamatan terbatas sehingga jadwal monev PBB di desa jadi tertunda, hal ini terkadang sering disalahgunakan oleh perangkat desa uang PBB yang harusnya disetor namun dipinjam terlebih dahulu untuk itu pihak Kecamatan dalam hal ini Camat beserta jajarannya berfikir untuk mencari solusi yang terbaik salah satunya dengan membuat Aplikasi Manajemen Pemantauan Penangihan PBB di kecamatan Wonosari.

Inovasi SIMPARI ini merupakan **inovasi baru** yang dibuat Kecamatan Wonosari dalam rangka optimalisasi penagihan PBB dan untuk meminimalisir penyalahgunaan atau penyelewengan uang hasil penagihan PBB yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan mungkin ini merupakan Inovasi Pembaharu yang bisa dijadikan role model bagi Kecamatan-Kecamatan lain di wilayah Kabupaten Bondowoso (bisa di replikasikan untuk kecamatan lain).

Dengan inovasi ini nantinya diharapkan :

1. Adanya manajemen khusus Penagihan Pajak PBB-P2 dan PBHTB di kecamatan wonosari sehingga diharapkan nantinya bisa menjadi rekam jejak apabila disuatu hari nanti terjadi persoalan yang tidak diinginkan antara penagih dengan wajib pajak;
2. Adanya tanggung jawab dan beban moral bagi penagih dan Kepala Desa karena kinerjanya dipantau langsung oleh Camat, Sekcam dan Para Kasi yang membidangi kinerja perangkat desa atau Pemerintah Desa;
3. Harapannya di Tahun 2023 ini PBB-P2 dan PBHTB di Kecamatan Wonosari Bisa Lunas 100%;
4. Pihak Kecamatan selaku Pembina Desa jadi tahu mana perangkat desa / Pemerintah Desa yang berkinerja baik dan mana perangkat desa / pemerintah Desa yang kurang optimal dalam melaksanakan penagihan pajak sebab di Aplikasi sudah bisa dilihat berapa kali perangkat datang ke rumah wajib pajak untuk melakukan penagihan dengan adanya dokumentasi di aploud di aplikasi, Siapa Saja Wajib pajak yang sudah membayar dan yang belum membayar pajak serta siapa saja wajib pajak yang melakukan pembayaran dengan cara dicicil kepada pemungut pajak, berapa uang yang ada di pemungut, berapa uang yang ada dibendahara dan berapa uang pajak yang sudah masuk atau disetor ke Bendahara PBB Kecamatan;
5. Dengan Adanya Aplikasi SIMPARI ini diharapkan dapat meminimalisir penyalahgunaan /

penyelewengan penggunaan uang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak yang dilakukan oleh Oknum perangkat atau Pemerintah Desa.

# SIGNIFIKANSI

Inovasi "SIMPARI" ini dibuat dalam rangka untuk mengadministrasikan atau menertibkan kegiatan penagihan PBB baik secara administrasi maupun Keuangan, selain itu Inovasi ini dibuat dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi Kecamatan untuk mensukseskan Penagihan PBB-P2 dan PBHTB di Tahun 2023 dan di tahun-tahun berikutnya, adapun permasalahan yang dihadapi Kecamatan Wonosari **sebelum membuat Inovasi "SIMPARI"** antara lain :

1. Ketidaksinkronan antara uang yang disetor perangkat dari desa dengan NOP yang ada artinya banyak perangkat desa yang kurang mampu membuat administrasi pembayaran PBB, sehingga masih ada desa yang hanya menyetorkan uang ke bendahara PBB kecamatan tanpa membawa NOP/STTS;
2. Sering terjadi perselisihan/Mis komunikasi antara bendahara/petugas penagih PBB dari Kecamatan dengan penagih PBB/Bendahara PBB dari Desa terkait jumlah nominal setoran;
3. Adanya Oknum-Oknum Kepala Desa / Perangkat desa yang kurang berkinerja (pemerintah desa dalam hal ini terkadang kepala desa dan perangkatnya menggunakan uang setoran PBB untuk kepentingan pribadi) namun setelah di monev mereka beralasan wajib pajak belum bayar/tidak mau bayar karena tidak dapat Pupuk Bersubsidi, dll;
4. Adanya Laporan dari Masyarakat yang merasa dirugikan (wajib Pajak sudah membayar namun pada saat dia butuh untuk mengurus administrasi akta jual beli/balik nama namun dia masih kena denda karena di aplikasi Bapenda Kabupaten PBB nya belum dibayar) hal ini terjadi karena kurang rapinya manajemen PBB-P2 dan PBHTB baik di Desa maupun di Kecamatan Wonosari
5. Adanya Pengaruh Politisasi di Desa (imbis dari Pilkades) adanya perpecahan tim sukses pada saat pilkades sehingga ada wajib pajak yang tidak mau membayar pajak karena di tagih oleh perangkat desa pendukung kades terpilih;
6. Di Desa masih banyak masyarakat miskin (miskin Ekstrem) sehingga tidak mampu membayar PBB, jangankan membayar PBB untuk makan saja tidak cukup.

Namun **setelah menggunakan Inovasi "SIMPARI"** semua permasalahan diatas dapat teratasi secara otomatis antara lain :

1. Di Aplikasi SIMPARI ini tercantum fitur data statistik PBB (Nama Objek nama wajib pajak alamat objek dan alamat wajib pajak), nama pemugut, jumlah baku pemugut sudah melakukan penagihan atau tidak, siapa saja wajib pajak yang sudah membayar dan yang belum membayar, sehingga Camat beserta kasi yang membidangi bisa memantau kinerja perangkat desa dalam melakukan penagihan pajak, kapan saja dan dimana saja melalui Hp androidnya, sehingga secara otomatis administrasi PBB sudah termanajemen dengan baik suatu saat kalau ada permasalahan mudah mengatasinya
2. Sudah tidak akan terjadi lagi mis komunikasi antara petugas kecamatan dengan desa karena data antara kecamatan dengan desa sudah sinkron, nominal uang dengan NOP juga sudah sinkron;
3. Mengurangi/meminimalisir penyalahgunaan atau penyelewengan keuangan Pajak di Desa karena di aplikasi sudah tertera jumlah uang yang ada di desa sudah tersetor ke Bendahara kecamatan atau belum sudah ada fiturnya, camat beserta jajarannya tinggal memanggil dan berkoordinasi dengan desa;
4. Untuk mengatasi dampak politisasi di aplikasi SIMPARI ini sudah ada data siapa saja wajib pajak yang sudah atau belum membayar sehingga Kecamatan tinggal menurunkan kasi dan staf yang membidangi untuk turun langsung melakukan penagihan atau membuat surat himbuan atau tangihan pajak sehingga wajib pajak bisa langsung setor ke Kecamatan tanpa melalui desa dalam rangka mempermudah pelayanan publik dan mensukseskan penagihan PBB di wilayah Kecamatan Wonosari;
5. Begitu juga bagi masyarakat yang tidak mampu dan belum bisa setor PBB mereka bisa melakukan pembayaran dengan cara mencicil, karena Aplikasi "SIMPARI" ini juga disediakan fitur pembayaran Pajak dengan cara di cicil selain ini kalau masyarakat betul-betul tidak mampu pihak kecamatan bisa melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa agar yang bersangkutan bisa mendapatkan bantuan BLT DD atau berkoordinasi dengan pendamping PKH agar yang bersangkutan diusulkan untuk menerima bantuan PKH dll.

# KONTRIBUSI TERHADAP CAPAIAN TPB

Kontribusi nyata yang diharapkan Kecamatan Wonosari pada khususnya dan Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada umumnya melalui Inovasi "SIMPARI" adalah Prosentase Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan - Perkotaan dan Pedesaan di tahun 2023 ini bisa lunas 100% sesuai dengan target yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Bondowoso sehingga PAD Kabupaten Bondowoso bisa meningkat lebih besar di tahun 2023 dan tahun-tahun kedepan, Kalau inovasi ini berhasil harapan kami inovasi ini bisa direplikasikan untuk Kecamatan-Kecamatan lain yang berada di kabupaten Bondowoso yang PBB-nya belum lunas 100% di tahun 2022 kemarin, sehingga penagihan PBB di Kabupaten Bondowoso bisa optimal, kalau semua kecamatan PBB-P2 dan PBHTB-nya bisa lunas 100% maka PAD kabupaten Bondowoso bisa meningkat, seperti yang kita ketahui PAD Kabupaten Bondowoso sangat kecil dibandingkan dengan Kabupaten lain, dan Kabupaten Bondowoso selama ini bisa membangun dengan mengandalkan dana tambahan atau dana sharing dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk itu tugas kita bersama untuk berfikir dan membuat suatu ide/gagasan atau inovasi baru untuk membangun Bondowoso agar bisa lepas dari imej Daerah Tertinggal (IDT) atau kota pensiunan.

## ADAPTABILITAS

Inovasi "SIMPARI" Kecamatan Wonosari ini bisa di Replikasi oleh kecamatan-Kecamatan lain baik di Kabupaten Bondowoso maupun di wilayah kecamatan di Kabupaten lain di wilayah Provinsi Jawa Timur atau bahkan di seluruh Indonesia sebab karakteristik tata kerja di semua kecamatan hampir sama sedangkan populasi jumlah Penduduk wilayah Kecamatan Wonosari sejumlah 40.876 Jiwa Periode Maret 2023 sedangkan Jumlah Wajib Pajak di Kecamatan Wonosari sejumlah 18.554 Wajib Pajak Baku PBB Kecamatan Wonosari sejumlah 1.232.257.520 dengan jumlah Desa 12 Desa, 72 Dusun dan 82 Rw dan Rt. Sebanyak 234

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 209 dijelaskan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten/kota, sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) huruf f, sebagai berikut : (2) Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. sekretariat daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat; d. dinas; e. badan; dan f. Kecamatan. Kedudukan Kecamatan dijelaskan pada pasal 221 UU No. 23 Th.2014 sebagai berikut : (1) Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah. (3) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/ wali kota disampaikan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan. Jadi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, dan Penagihan PBB-P2 dan PBHTB ini merupakan salah satu bentuk dari tugas koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan kepada Pemerintahan Desa.

# KEBERLANJUTAN

Untuk membuat Inovasi ini, Kecamatan Wonosari melakukan koordinasi secara intens dengan Pemerintah Desa utamanya kepada Kepala Desa Se-wilayah Kecamatan Wonosari (12 Desa) untuk mendukung Inovasi ini. Pemerintah Desa Se-Wilayah Kecamatan Wonosari menggunakan Dana Desa Sub Bidang Pemerintahan Desa. Semua Desa menganggarkan penggunaan Aplikasi ini di Perencanaan Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa dan dimasukkan ke APBdes Tahun 2023, sedangkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memanfaatkan SDM yang ada di Desa (perangkat Desa) dan SDM yang ada di kecamatan, adapun metode yang dipakai dalam melaksanakan inovasi "SIMPARI" ini Pihak Kecamatan membentuk Tim dengan menggunakan SDM di Desa (Perangkat Desa) yang memiliki kemampuan yang cukup dibidang IT untuk dijadikan nara sumber atau pembuat aplikasi, adapun apa saja yang harus ada di aplikasi tersebut pihak Kecamatan (Camat dan Kasi) yang menentukan setelah aplikasi dibuat dan Tim inti Kecamatan semua paham maka Camat beserta jajarannya yang masuk Tim Turun langsung ke semua desa di wilayah Kecamatan Wonosari untuk melakukan Sosialisasi ke semua desa, Peralatan yang digunakan adalah Komputer atau laptop yang ada di Desa (untuk entri Data wajib pajak di desanya masing-masing), Hp android (Camat, Sekcam dan Kasi yang membidangi dan bendahara PBB kecamatan) untuk kontroling data statistik penerimaan dan penagihan pajak dari masing-masing desa, jumlah pemugut pajak di desa, jumlah keuangan yang sudah di peroleh per-pemugut, jumlah keuangan yang ada di bendahara desa, jumlah keuangan yang sudah setor pajak ke Kecamatan jumlah wajib pajak yang pembayarannya dengan cara di cicil dan data wajib pajak perdesa yang belum bayar PBB, Strategi yang digunakan Kecamatan agar Inovasi ini nantinya terus berjalan yakni Kecamatan terus melakukan koordinasi dengan seluruh pihak utamanya para kepala Desa dan Perangkat Desanya serta melakukan perbaikan atau mencari kelemahan-kelemahan apa saja yang belum ada di Aplikasi ini untuk terus di update dan di tingkatkan agar tahun-tahun ke depannya aplikasi ini tetap berjalan dan perangkat desa selaku pemugut pajak diuntungkan dengan adanya aplikasi ini karena pihak kecamatan tahu siapa saja wajib pajak yang menunggak atau belum bayar PBB sehingga bisa mencari solusi dengan mengingatkan wajib pajak dengan memberikan surat peringatan pembayaran pajak melalui surat atau tim kecamatan turun langsung melakukan penagihan pajak di dampingi oleh pemugut pajak / perangkat desa dan Kecamatan juga menggunakan strategi Pelayanan Publik dimana Wajib Pajak yang belum bayar PBB di Aplikasi yang mau melakukan pelayanan diminta untuk membayar PBB dulu sehingga secara otomatis masyarakat mendapatkan sanksi moral, hal ini merupakan strategi instusional, strategi sosial dan strategi manajerial yang dilakukan kecamatan Wonosari untuk mensukseskan Inovasi "SIMPARI".

# KOLABORASI PEMANGKU KEPENTINGAN

Untuk mensukseskan Inovasi "SIMPARI" Kecamatan Wonosari telah melakukan kerjasama utamanya dengan Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) sebagai objek atau pelaksana pemugutan Pajak di Wilayah kecamatan Wonosari, adapun yang merancang Aplikasi ini adalah Camat, sekcam dan Kasi (Kasi pemerintahan, Kasi Pemberdayaan masyarakat, Sekdes Tumpang dan Staf Pelaksana di Kecamatan Wonosari) sedangkan pihak yang akan melakukan evaluasi penggunaan Aplikasi ini juga Tim dari Kecamatan (camat beserta jajarannya) sedangkan pihak-pihak yang dimintai tolong untuk terlibat dalam mendukung suksesnya penggunaan Inovasi pada Aplikasi SIMPARI ini antara lain : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso sebagai leading Sektor Pembayaran PBB-P2 dan PBHTB, di kecamatan sendiri untuk mensukseskan Inovasi "SIMPARI" ini Camat juga bekerja sama dengan Penyuluh Pertanian (bertugas mensosialisasikan kepada petani, kelompok tani, pemilik kios), penyuluh Peternakan (mensosialisasikan kepada peternak atau pemilik ternak), pendamping Desa untuk ikut memacu desa agar lebih giat melakukan penagihan Pajak, Pendamping PKH (Bertugas membantu memberikan penyuluhan kepada masyarakat penerima bantuan Manfaat (KPM PKH), babinsa dan Babinkamtibmas di Wilayah kecamatan Wonosari.

